

80546 ✓

80546.pdf/26

96/00546

LAPORAN EVALUASI

PROGRAM SERTIFIKAT WIRAUUSAHA MANDIRI TERARAH

OLEH:

Ir. SRI YUNIATI PUTRI KOES HARDINI
drh. SANTI DEWIKI

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TERBUKA

1996

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul : Laporan Evaluasi Program Sertifikat Wirausaha Mandiri Terarah, FISIP Universitas Terbuka

Pembuat Laporan

1. Nama : Ir. Sri Yuniati Putri Koes Hardini
Nip : 131 866 182
Jabatan : Asisten Ahli
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

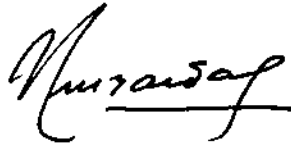
2. Nama : drh. Santi Dewiki
Nip : 131 855 547
Jabatan : Asisten Ahli
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Ketua Program Sertifikat
Wirausaha Mandiri Terarah**

Mengetahui/Menyetujui



**Drs. Alex Rumondor
MS
Nip. 130 117 532**



**dra. Hj. Nurbaedah Dachlan,
Nip 130 549 123**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul : Laporan Evaluasi Program Sertifikat Wirausaha Mandiri Terarah, FISIP Universitas Terbuka

Pembuat Laporan

1. Nama : Ir. Sri Yuniati Putri Koes Hardini
Nip : 131 866 182
Jabatan : Asisten Ahli
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

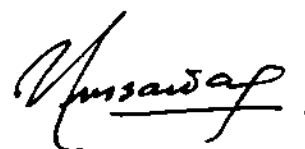
2. Nama : drh. Santi Dewiki
Nip : 131 855 547
Jabatan : Asisten Ahli
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Ketua Program Sertifikat
Wirausaha Mandiri Terarah**



**Drs. Alex Rumondor
MS
Nip. 130 117 532**

Mengetahui/Menyetujui



**dra. Hj. Nurbaedah Dachlan,
Nip 130 549 123**

LAPORAN EVALUASI**PROGRAM SERTIFIKAT WIRA USAHA MANDIRI TERARAH
FISIP UNIVERSITAS TERBUKA**

DAFTAR ISI	Halaman
I. PENDAHULUAN	1 - 4
A. LATAR BELAKANG	
B. PERMASALAHAN	
C. TUJUAN	
D. METODE	
II. TINJAUAN PUSTAKA	5 - 16
A. ORGANISASI	
B. PENGELOLAAN	
C. ASPEK PENDIDIKAN	
D. SISTEM PROGRAM DIKLAT WMT	
E. KURIKULUM	
F. PELAYANAN MAHASISWA	
III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN HASIL	17 - 21
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	22
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan untuk memperkokoh landasan persiapan tahap tinggal landas, Universitas Terbuka (UT) sejak tahun akademik 1987/1988 mulai mengembangkan program studi baru dengan prioritas pada program pendidikan bersertifikat.

Salah satu ciri penyelenggaraan program sertifikat ini adalah keterpaduan komunikasi dan kerja sama antara para pakar, pengelola pendidikan dan latihan keterampilan dari departemen/lembaga pemerintah serta swasta yang membutuhkan profesi keterampilan itu secara sektoral maupun regional.

Untuk melaksanakan hal di atas, UT mengadakan kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) RI pada tanggal 25 Agustus 1988 dalam bidang pengkajian, peningkatan pendidikan, pelatihan dan penelitian guna pengabdian pada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Rektor UT Nomor 083/PT45.KEP/1988 tentang penyelenggaraan program pendidikan sertifikat dalam rangka pendidikan berlanjut (Continuing Education/CE), yang pengelolaannya dipercayakan kepada Lembaga Pendidikan Profesi, Industri dan Niaga dan disingkat menjadi LAPPIN.

Program pendidikan sertifikat ini mengembangkan program Wirausaha Mandiri Terarah (WMT) atau Self Employment Entrepreneurship Development (SEED).

Program ini ditujukan bagi para lulusan SLTA yang merupakan angkatan kerja terbesar di Indonesia (kira-kira 22.5%) dari jumlah angkatan kerja dalam PELITA V yang jumlahnya 11,9 juta juga dengan melihat data banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang tidak memperoleh pekerjaan sementara pada saat yang

bersamaan terdapat kekurangan akan tenaga terampil seperti terlihat pada tabel di bawah ini

**JUMLAH ANGKATAN KERJA DAN PEKERJA SESUAI DENGAN
TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 1986**

Tingkat Pendidikan	Bekerja		Mencari kerja		Angkatan Kerja	
	000	%	000	%	000	%
Sampai SD	56.701	99	622	1	57.323	100
SMTU Umum	4.511	94	278	6	4.789	100
SMTU Kejuruan	891	96	39	4	930	100
SMTA Umum	2.525	82	544	18	3.070	100
SMTA Kejuruan	2.830	90	289	10	3.128	100
Diploma	575	93	42	7	617	100
S1	305	91	32	9	337	100
JUMLAH	68.338		1.855		70.193	

Sumber: BPS Statistik Indonesia 1987

Selain itu, program ini berusaha untuk mengantisipasi kebutuhan profesi di bidang industri dan niaga yang dikelola secara perorangan, keluarga atau kelompok swadaya di sektor informal yang diharapkan dapat menyerap angkatan kerja sebanyak kurang lebih 75%.

Program sertifikat WMT diharapkan secara terpadu mengait pula pada peranan perusahaan-perusahaan dan lembaga perbankan yang menunjang profesi wirausaha mandiri yang terarah keberhasilannya.

Pada awalnya program ini dikelola oleh Yayasan LAPPIN, Depnaker RI dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin Indonesia) yang diwakili oleh Yayasan Pendidikan Kadin Indonesia (YAPENKI).

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang timbul setelah program sertifikat WMT ini terbentuk adalah tidak adanya peserta dalam jumlah yang layak untuk disebut sebagai suatu

program pendidikan yang diminati oleh masyarakat. Meskipun promosi sudah dilaksanakan bahkan sudah melalui kunjungan ke SLTA yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Namun ternyata memang masih banyak kendala yang harus dihadapi untuk benar-benar menjadi program yang tidak hanya namanya saja yang mandiri tetapi juga dalam pelaksanaannya.

Karena minimnya jumlah peserta maka berdasarkan SK Rektor Universitas Terbuka Nomor 84a/PT45/KEP/1991 tertanggal 20 Juli, Yayasan LAPPIN dibubarkan dan pada tanggal 24 September 1991 dengan SK Rektor UT Nomor 110/PT45/KEP/1991 program ini diintegrasikan ke FISIP UT dengan nama program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.

C. TUJUAN

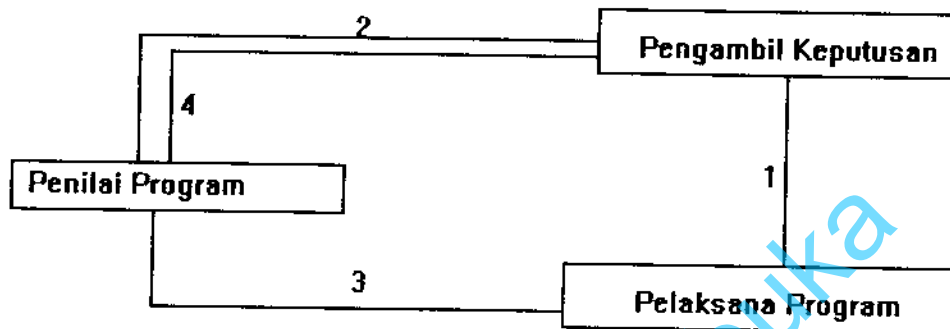
Evaluasi ini bertujuan untuk membenahi manajemen program sertifikat WMT yang menyangkut beberapa hal, yaitu:

1. memperbaiki kerja sama antar instansi, baik antara Depnaker RI maupun Kadin Indonesia.
2. menjelaskan dan menjalankan dengan konsisten petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah dibuat bersama.
3. memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan agar menjadi program yang diminati. Dan pada saat yang bersamaan mencari alternatif cara pengelolaan yang lebih baik.
4. memberi masukan untuk mengembangkan atau meninjau kembali Buku Materi Pokok (BMP) yang sudah ada atau BMP tersebut dijadikan BMP khusus yang berupa matakuliah yang dapat memotivasi mahasiswa agar setelah lulus, siap terjun ke masyarakat dengan menciptakan peluang kerja. Dengan perbaikan BMP itu dapat dimasukkan sebagai mata kuliah pilihan pada semua program

studi yang tentunya dengan pertimbangan tidak melanggar ketentuan dari Dirjen Perguruan Tinggi.

D. METODE

Dalam melakukan penilaian digunakan skema hubungan sebagai berikut



1. Dekan mengambil keputusan untuk membentuk tim penilai bagi program WMT yang sudah tidak efisien lagi untuk diteruskan pelaksanaannya.
2. Tim penilai melaksanakan tugasnya untuk mengevaluasi program dengan memeriksa hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan program, kemudian melaporkan hasilnya kepada Dekan.
3. Pelaksana Program menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh tim penilai program dengan perintah Dekan.

Masalah yang dinilai meliputi:

1. Sejauh mana petugas gabungan yang di lapangan memahami dan melaksanakan tugasnya.
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan karena kurang padunya petugas yang berada di lapangan.
3. Bagaimana pelaksanaan penyediaan sarana penunjang di daerah yang sudah disepakati untuk digunakan oleh siswa program kerjasama ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan SK Rektor UT Nomor 083/PT.45/KEP/1988, tentang penunjukkan Lembaga Pendidikan Profesi, Industri dan Niaga sebagai Pembantu Penyelenggara Program Pengajaran Profesi, kajian Industri dan Niaga di Lingkungan Universitas Terbuka, maka didirikanlah Lembaga Pendidikan Profesi Industri dan Niaga yang disingkat LAPPIN.

Hal ini untuk memenuhi prasarana dan sarana bagi mahasiswa UT yang ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang yang berhubungan dengan program pengajaran profesi, industri dan niaga.

LAPPIN UT menawarkan program sertifikat Wirausaha Mandiri Terarah, tetapi karena program sertifikat ini kurang peminatnya maka diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program ini berlangsung dan bagaimana hasil yang diperoleh serta bagaimana penyelenggaraannya.

A. ORGANISASI

Dalam melaksanakan organisasi yang merupakan hasil kerja sama dari beberapa instansi ini, pada awalnya direncanakan dan diharapkan adanya suatu kerja sama dan keterpaduan kerja melalui tugas yang sudah ditentukan bagi masing-masing instansi, yaitu:

1. Departemen Tenaga Kerja RI

- a. Memanfaatkan BLK/KLK/BPPD/UPN serta kejuruan-kejuruan multi sektoral pada balai-balai latihan tersebut.
- b. Memanfaatkan para instruktur dan pemandu serta "job-sheets" atau modul dan media lain yang ada.

- c. Memanfaatkan kerja sama dan koordinasi secara fungsional yang relevan sesuai tugas pokok dan fungsi Depnaker RI.

2. Universitas Terbuka

- a. Memanfaatkan teknologi pendidikan jarak jauh dalam pendidikan berlanjut dengan multi media bersama pemanfaatan tutorial intensif dalam praktek lapangan melalui UPBJJ dan balai-balai belajar serta kelompok mahasiswa atau kelompok usaha mahasiswa (Poksamas).
- b. Memonitor dan mengkoordinasikan LAPPIN di daerah (LAPPINDA).
- c. Promosi secara masal serta meregistrasi mahasiswa serta memanfaatkan media komunikasi yang telah berjalan.
- d. Melalui LAPPIN Pusat dan Tim Akademik dan Latihan (AKLAT) melaksanakan pengendalian akademik, ujian dan sertifikasi.

3. Kadin Indonesia melalui YAPENKI.

- a. Pengerahan sumber dana dan fasilitas latihan di perusahaan, studi kasus, usaha magang di perusahaan industri, jasa, koperasi dan BUMN.
- b. Bimbingan perintisan pengembangan organisasi usaha, permodalan, perkreditan bersama bank, lembaga non bank melalui proyek usaha.
- c. Merintis konsultasi usaha bagi wirausahawan mandiri yang potensial mampu melaksanakan usaha di daerah dan di pusat melalui Poksamas.

B. PENGELOLAAN

Tugas masing-masing instansi tersebut dikelola oleh organisasi yang berada di pusat dan daerah.

1. Pusat

Organisasi pusat memanfaatkan fasilitas LAPPIN-UT membentuk Tim Akademik dan Latihan LAPPIN Pusat (Tim Aklat LAPPINPUS), yang anggotanya ter-

diri dari para pakar dan fasilitator organisasi yang terkait. Organisasi ini dalam tugas hariannya dilakukan oleh Direktur LAPPIN UT yaitu drs. Alex Rumondor.

2. Daerah

Organisasi di daerah dikelola oleh Tim Aklat LAPPINDA. Tim ini ditetapkan oleh LAPPIN UT atas usul kepala UPBJJ yang juga sebagai pimpinan dengan anggotanya para pakar dan fasilitator dari Kanwil Depnaker, Kadin Daerah dan instansi yang terkait di daerah yang bersangkutan.

C. ASPEK PENDIDIKAN

Program sertifikat WMT dalam pengertiannya mengacu kepada istilah Continuing Education (CE). CE menurut John F. Ellis adalah kegiatan belajar terstruktur yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan bagi kelompok profesi dan terhadap orang-orang yang tidak memperoleh pendidikan di bidang keguruan/profesi.

Dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan tinggi, terutama untuk program sertifikat, maka UT sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri dengan sistem belajar jarak jauhnya perlu dikelola secara terpadu dalam gabungannya dengan SISLTKERNAS Depnaker RI dan lembaga terkait lainnya.

Aspek-aspek pendidikan program sertifikat ini adalah

1. Upaya mencari pasar baru guna perkembangan UT dalam menyerap lulusan SLTA.
2. Upaya mengatasi masalah kesempatan kerja melalui pengembangan profesi wirausaha mandiri dan usaha kecil.
3. Sifat pendidikan dan latihan kerja program sertifikat WMT yang berkaitan dengan aspek antara lain:
 - a. mengembangkan sikap dan motivasi kerja.
 - b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.

- c. mengembangkan sikap dan kemampuan wirausaha.
- 4. Upaya mengatasi masalah pendidikan dan latihan kerja kewirausahaan dalam pembangunan.

Konsepsi dasar program sertifikat WMT adalah

1. Pendidikan merupakan suatu proses yang telah dimulai sejak manusia lahir hingga akhir hayat. Dari pendidikan formal sampai pendidikan informal.
2. Materi dan sistem pendidikan itu berkembang sejalan dengan tuntutan/syarat-syarat berusaha.
3. Program pendidikan sertifikat WMT, memberi motivasi akan arah pengembangan kemandirian melalui 4 faktor, yakni
 - a. Pendidikan dan latihan kerja mandiri.
 - b. Sistem jaringan informasi bisnis.
 - c. Teknologi tepat guna.
 - d. Kemudahan kredibilitas perkreditan dan permodalan.

Program sertifikat WMT direncanakan sebagai suatu program pendidikan dan latihan (diklat) untuk 1-2 semester yang dimulai pada tahun akademik 1989.

Adapun sistem belajar yang dipakai adalah sistem belajar jarak jauh dengan cara belajar mandiri ditambah tutorial tatap muka ataupun tertulis.

Praktek lapangan/kejuruan menggunakan instruktur, sarana Balai latihan Kerja (BLK) ataupun fasilitas lainnya seperti pemanduan yang melibatkan Pemandu dari Depnaker RI serta permagangan di perusahaan yang bergabung di dalam Kadin Indonesia, baik di pusat maupun di daerah.

Tujuan Diklat WMT

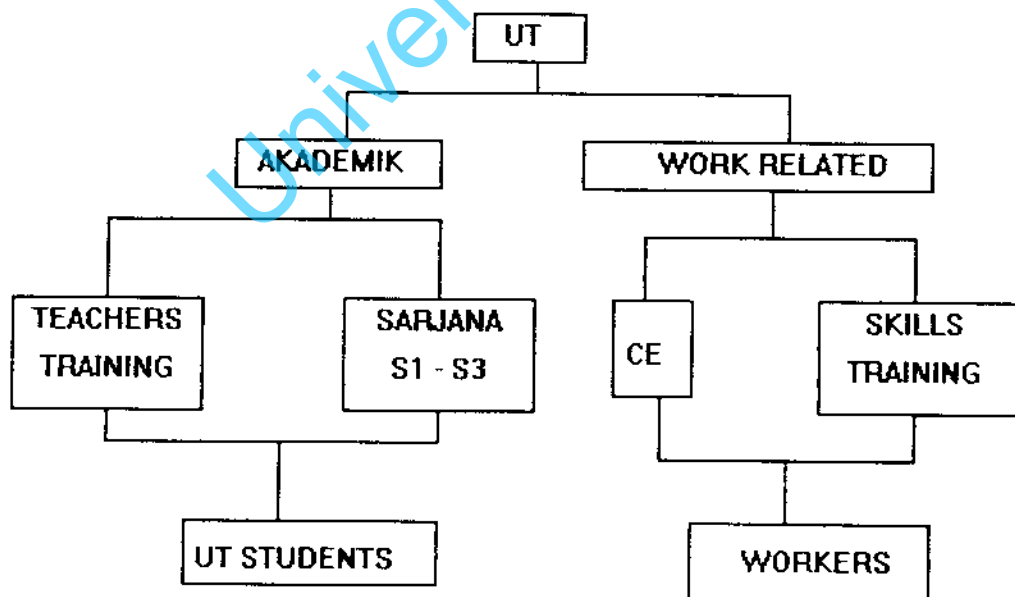
1. Tujuan Umum
 - a. meningkatkan motivasi dan kewirausahaan mandiri dan pendidikan berlanjut/berkesinambungan.

- b. mendidik, melatih dan menghasilkan lulusan yang berjiwa mandiri, mempunyai integritas dan berkepribadian tinggi.
- c. mampu menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan untuk para angkatan kerja di sektor tradisional, informal dan sektor formal.

2. Tujuan khusus

- a. memiliki setiap pengetahuan, keterampilan serta kemampuan berusaha secara mandiri.
- b. peka terhadap perkembangan nilai tambah usaha di lingkungannya dengan jalan mengorganisasikan usaha tersebut dari kalangan kelompok usaha mahasiswa dan masyarakat.
- c. mampu mengamati dan menghitung nilai tambah dan keuntungan berusaha melalui latihan panduan pekerjaan praktek di bidang manajemen, industri, niaga dan jasa.
- d. mampu memanfaatkan fasilitas permodalan usaha serta perkreditan, bimbingan Ketenagakerjaan dan lembaga perbankan / non bank.

Adapun model yang menjadi tujuan adalah sebagai berikut:



IV.

C. SISTEM PROGRAM DIKLAT WMT

Sistem program diklat yang direncanakan adalah gabungan program pendidikan teknologi pendidikan jarak jauh dengan SISLATER terpadu dalam sistem dan kelembagaan diklat.

a. Metode Belajar dan latihan

Secara rinci sistem belajar terbuka yang direncanakan dan yang diharapkan adalah kegiatan belajar sebagai berikut

1. mempelajari bahan tertulis (Buku Materi Pokok) yang telah diprogramkan.
2. interaksi tatap muka dengan tutorial oleh instruktur, pemandu wirausaha baik langsung maupun tidak langsung.
3. interaksi antara individu dalam kelompok belajar melalui POKSAMAS.
4. mendengarkan dan menyaksikan program audiovisual dsb.
5. praktikum di laboratorium BLK dan kerja lapangan dalam bentuk magang.
6. mengerjakan ujian teori dan praktek semester.

b. Metode Latihan Kerja (Latker) WMT

LAPPIN UT bekerjasama dengan Depnaker RI dan Kadin Indonesia mengharapkan agar mahasiswa/peserta diarahkan untuk menambah etika kerja yang disiplin, efisien dalam meningkatkan motivasi, kreativitas dan kemauan kerja untuk berusaha mandiri.

Yang dimaksud dengan Latker adalah proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan kerja atau keterampilan (teknis/manajerial) yang disyaratkan bagi suatu jabatan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dan dalam waktu yang singkat serta mengutamakan praktek dan teori.

Memang ada jalur khusus yang direncanakan oleh LAPPIN dalam mengantarkan tenaga kerja atau usaha mandiri melalui BLK Depnaker, yakni lulusan SLTA baik

yang direkrut dari bursa tenaga kerja maupun yang belum terdaftar. Hal itu sesuai dengan Petunjuk Pelaksana program tertanggal 18 Januari 1989.

Metode Latker terdiri dari

1. Peralatan Latker

Peralatan latihan disusun berdasarkan kebutuhan untuk kegiatan pemberian pengetahuan/teori. Fasilitas bahan praktek merupakan keseluruhan bahan latihan yang tersedia pada BLK Depnaker RI.

2. Instruktur Latker

Para instruktur yang dilibatkan dalam latker usaha mandiri dalam rangka menyelesaikan program latihan dibedakan menjadi:

- a. Instruktur Fisik Mental Disiplin (FMD) yang diambil dari instruktur diklat ABRI.
- b. Instruktur keterampilan/keahlian adalah instruktur dari BLK Depnaker RI yang disiapkan khusus untuk keperluan tersebut.
- c. Pemanduan Usaha kewirausahaan yang diambil dari instruktur yang khusus disiapkan untuk memberi pembinaan kepada pengusaha yang ada di unit organisasi Pusat Produktivitas (PPN) Depnaker RI dan BPPD.

3. Persyaratan dan prosedur untuk mengikuti Latker

a. Syarat

- lulusan SLTA
- terdaftar sebagai mahasiswa LAPPIN UT.
- berbadan sehat.
- berkelakuan baik.

b. Prosedur

- calon peserta mendaftar ke UPBJJ UT di setiap daerah.
- memberikan tanda bukti persyaratan yang ditentukan.

c. Kelompok Usaha mahasiswa (POKSAMAS).

1. Fungsi POKSAMAS

Kelompok usaha mahasiswa dari diklat wirausaha mandiri ini berfungsi untuk memacu mahasiswa agar berprestasi dalam usaha di bidang industri, niaga dan jasa bersama pelaku ekonomi lain di lingkungannya masing-masing.

2. Peranan POKSAMAS

Jika POKSAMAS yang direncanakan dan diharapkan lancar, maka kelompok ini sangat berperan dalam membantu mahasiswa menyelesaikan masalah belajar dan latihan berusaha di lingkungannya selama masa pendidikan. Selain itu juga memanfaatkan kemudahan yang ada, misalnya

- a. mempermudah pemahaman dan penerapan (praktek) materi belajar dan latihan.
- b. mempercepat penyebaran informasi dan komunikasi usaha seperti panduan, bimbingan dari LAPPIN UT kepada mahasiswa.
- c. dapat mendiskusikan rencana kegiatan akademik dan latihan seperti:
 - pengisian formulir registrasi.
 - bimbingan usaha dengan instansi yang diperlukan.
 - merencanakan untuk mendirikan usaha bersama.

3. Pembentukan POKSAMAS

Pada awalnya POKSAMAS dibentuk dengan cara

- a. mengidentifikasi alamat mahasiswa yang bertempat tinggal saling berdekatan atau memiliki sektor usaha yang sejenis/sejalan. Data alamat usaha mahasiswa diperoleh LAPPIN UT dari formulir registrasi yang dikembalikan oleh mahasiswa ke LAPPIN UT.
- b. LAPPIN UT menganjurkan agar para peserta membentuk kelompok belajar POKSAMAS.

- c. Setelah POKSAMAS terbentuk, ketuanya dilaporkan ke UPBJJ UT dan Sekretaris Pelaksana LAPPINDA dengan menyebut nama dan alamat ketua.

4. Pelayanan POKSAMAS

Pada prinsipnya POKSAMAS pada saat itu diharapkan banyak mengambil inisiatif sendiri, akan tetapi diakui bahwa ada kegiatan usaha dan latihan yang tidak dapat diselesaikan sendiri.

Kemudahan yang diharapkan dapat diberikan oleh LAPPIN UT, UPBJJ, Kanwil Depnaker maupun Kadin Indonesia, antara lain:

- a. Surat dukungan untuk mendapatkan ruang belajar bagi POKSAMAS.
- b. Membantu POKSAMAS untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang materi pokok atau materi referensi.
- c. Membantu POKSAMAS untuk menentukan jadwal latihan di BLK, memberikan bahan panduan dan sumber belajar tambahan berupa penceramah, bahan belajar dan bahan-bahan lainnya.
- d. Memberikan tutorial tertulis maupun tatap muka.

E. KURIKULUM

1. Pengertian SKS dan Praktek Lapangan.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah ukuran beban belajar. Pengertian jumlah sks yang digunakan LAPPIN adalah ekivalen dengan jumlah jam belajar efektif selama 18 minggu. Hal itu telah diperhitungkan dengan waktu belajar atau kesempatan yang tersedia dari mahasiswa.

2. Pengertian dan Penentuan Paket Mata Pelajaran dan Latihan/MPL

Paket Mata Pelajaran dan Latihan (MPL) adalah seperangkat mata pelajaran tertentu sebagai satu kesatuan yang berguna bagi peserta diklat, yang diterima pada saat melakukan registrasi dan pemesanan bahan belajar.

Pada semester 90.1 paket ini terdiri dari 6 matakuliah, yaitu

1. LAPP0001. Kewirausahaan dan Panduan.
2. LAPP0002. Motivasi Wirausaha.
3. LAPP0003. Manajemen Usaha Terapan.
4. LAPP0004. Kejuruan Lapangan Kerja dan Teknologi Tepat Guna.
5. ADNI4130. Pengantar Administrasi Niaga.
6. MKDU4104. Pendidikan Pancasila.

Pada semester 90.2 dan seterusnya, matakuliah LAPP004, Kejuruan Lapangan Kerja dan Teknologi Tepat Guna dibagi menjadi 2 seri, sebagai pengganti matakuliah ADNI 4130. Pengantar Administrasi Niaga dan juga terjadi penggantian kode matakuliah menjadi:

1. WIRA176. Kewirausahaan dan Panduan
2. WIRA177. Motivasi Wirausaha.
3. WIRA178. Manajemen Usaha Terapan.
4. WIRA179. Kejuruan Lapangan Kerja dan Teknologi Tepat Guna seri I
5. WIRA180. Kejuruan Lapangan Kerja dan Teknologi Tepat Guna seri II
6. MKDU4104. Pendidikan Pancasila

3. Proposal Usaha.

Proposal usaha ini tidak mempunyai sks dan hanya dibuat jika para mahasiswa telah melakukan praktek lapangan di bawah bimbingan instruktur atau Pemandu wirausaha yang ditunjuk oleh Kanwil Depnaker.

Jika mahasiswa membuat proposal usaha, maka predikat dalam sertifikat adalah Wirausahawan Madya. Sedangkan yang tidak membuat akan disebut sebagai Wirausahawan Muda.

E. PELAYANAN MAHASISWA

Pelayanan mahasiswa program WMT sebelum berintegrasi dengan FISIP berbeda dengan mahasiswa UT reguler. Pelayanan mahasiswa yang dilakukan

oleh LAPPIN akhirnya menjadi bumerang bagi pengelolaan program selanjutnya. Pelayanan mahasiswa ini dibagi menjadi:

1. Pelajanan Administrasi.

Bagi calon mahasiswa yang ingin mengikuti program WMT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Lulusan SLTA tanpa batasan tahun ijazah.
2. Pengusaha maupun pegawai lulusan SLTA.
3. Lulusan perguruan tinggi yang belum bekerja.
4. Para profesional yang berminat dan peminat lain yang ingin meningkatkan keterampilannya sebagai wirausahawan.

Registrasi.

Masa registrasi sama dengan yang berlaku di UT untuk mahasiswa reguler.

Registrasi bagi mahasiswa program WMT sebelum integrasi adalah sbb

- a. membeli formulir registrasi pertama di KPPF (Kantor Pos Penjual Formulir).

Berkas registrasi mahasiswa WMT berbeda dengan UT, yaitu bersampul coklat dan berkode P.

- b. Bagi mahasiswa yang mengulang disediakan registrasi ulang yang berisi formulir registrasi MPL dan dapat diperoleh di KPPF.

- c. Uang SPPL disetorkan ke BRI Cabang Fatmawati.

Prosedur Ujian

Mahasiswa program WMT diberi 2 kali kesempatan ujian untuk setiap registrasi yaitu ujian pertama dan ujian ulang.

Biaya

Biaya mengikuti program ini meliputi SPPL, Bahan Belajar, Biaya ujian ulang dan biaya latihan yang besarnya dirundingkan antara sekretaris LAPPINDA dan POKSAMAS.

Ujian

- Dilakukan 2 kali dalam setahun.
- Daftar mahasiswa dan ruang ujian disusun di UPBJJ/ penanggung jawab tempat ujian.

Pemeriksaan Ujian dilakukan secara manual.

Sertifikat diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan program yang diikutinya.

2. Pelayanan Akademik.

Pelayanan akademik meliputi:

1. Masa penyelesaian studi ditentukan dalam waktu satu semester, dan bila ada yang belum lulus dapat mengulang.
2. Tutorial
3. Panduan Usaha dilakukan oleh Instruktur atau Pemandu Usaha dari Depnaker di daerah-daerah.
4. Ujian.
5. Penilaian Ujian dilakukan di UT pusat, kecuali nilai proposal usaha dilakukan oleh Pemandu Usaha masing-masing daerah yang kemudian dikirim ke UT.

Universitas Terbuka

III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN HASIL.

A. Pelaksanaan Program.

Setelah dipersiapkan selama kurang lebih 1.5 tahun, akhirnya pada tahun 1990 program Wirausaha Mandiri Terarah paket A diluncurkan ke pasaran oleh Rektor UT dan Menteri Tenaga Kerja RI.

Karena program ini adalah hasil kerja sama antara UT, Depnaker RI dan Kadin Indonesia, maka pelaksanaannya juga dilakukan oleh ketiga instansi terkait. Namun kenyataannya tidaklah demikian, sebab yang terlibat secara langsung di lapangan hanya UT dan Depnaker saja.

Kanwil Depnaker yang aktif hanya di Jakarta dan Dili, sedangkan daerah lain nihil bahkan banyak yang tidak tahu adanya kerja sama ini walaupun sudah ada edaran dari Menaker RI ke daerah-daerah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan di lapangan masih banyak ditemui kendala. Begitu juga dengan Kadinda, bahkan sama sekali tidak tahu akan adanya kerja sama ini, sehingga otomatis tidak berperan sama sekali dalam pelaksanaan program WMT ini.

Di tingkat pusat, di mana pada saat pembukaan Ketua Kadin Indonesia menyatakan sanggup mencarikan Bapak Angkat bagi lulusan program WMT, ternyata setelah proposal hasil usaha dari para mahasiswa yang telah lulus angkatan pertama diserahkan kepada Ketua Kadin Indonesia, tidak ada tindak lanjutnya sehingga mahasiswa merasa sangat kecewa.

Dengan menurunnya jumlah mahasiswa di setiap semesternya, dan juga karena adanya perubahan kebijakan di UT, akhirnya program WMT yang tadinya dikelola yayasan LAPPIN UT, akhirnya di integrasikan ke FISIP UT dan diganti dengan nama baru menjadi program Kewirausahaan dan ketenagakerjaan.

Nama baru ini sebenarnya juga masih kurang cocok dengan menyebutkan adanya "Ketenagakerjaan", sebab di dalam modul yang digunakan teramat

sedikit menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan istilah ketenagakerjaan yang juga memiliki arti sangat luas.

Bila dilihat dari jumlah yang mendaftar, maka hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

Semester	89.2	90.1	91.1	92.2
Jumlah mahasiswa	88	66	td	td
Yang lulus	38	24	td	td

td: tidak diketahui dengan pasti (kurang dari 10 orang)

Sebenarnya ada beberapa tambahan mahasiswa lagi dari daerah, akan tetapi karena baik UPBJJ maupun Kanwil Depnaker setempat tidak begitu mengetahui tentang pelaksanaan program WMT ini, maka mereka mengundurkan diri/ tidak jadi mendaftar.

Pada semester kedua, matakuliah Administrasi Niaga diganti matakuliah Kejuruan Lapangan Kerja dan Teknologi Tepat Guna sen II.

Ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan dalam bimbingan pembuatan proposal. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan Kandepnaker wilayah tentang adanya kerja sama, sehingga Pemandu yang diharapkan dapat membimbing mahasiswa tidak ada. Jalan keluarnya adalah, mahasiswa mengirim langsung proposalnya (tanpa bimbingan dari Pemandu Kanwil Depnaker) ke UT Pusat dan dinilai oleh UT dengan versi penilaian yang berbeda dengan bila dinilai oleh Pemandu dari Depnaker.

B. Hasil Pelaksanaan Program

Ada beberapa keluhan dari mahasiswa yang mungkin merupakan masukan bagi pengembang program ini. Keluhan yang ada merupakan hasil dari kelemahan yang muncul akibat adanya kerja sama yang kurang baik yang terjadi di tingkat wilayah, antara lain:

1. Yang berhubungan dengan UT

Terpisahnya pengelolaan program ini dari program UT yang reguler, membuat program ini berjalan seolah-olah bukan milik UT tetapi milik swasta yang meminjam tempat di UT. Semua pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh pengembang program dari pengepakan sampai pengiriman modul (unit distribusi hanya merupakan tempat penyimpanan saja) dan dengan dana yang sangat terbatas.

Nilai hasil ujian juga diolah sendiri secara manual oleh pengembang program juga registrasinya berbeda formulir dan tidak langsung ke unit registrasi UT untuk diolah di sana. Hal ini berlangsung sampai program ini dialihkan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan keadaan yang seperti ini, maka agak sulit untuk memberikan pelayanan dan mendapatkan data yang akurat tentang keadaan mahasiswa yang mengikuti program ini yang belum selesai. Di kalangan UT sendiri hanya sedikit yang mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya program WMT ini dijalankan. Hal ini terlihat pada saat staf UT memberikan penyuluhan tentang keberadaan UT di SLTA di daerah Jakarta dan Bogor sehingga promosi untuk program WMT tidak ikut terangkat.

2. Yang berhubungan dengan instansi lain

Secara garis besar kesulitan yang terjadi adalah menyangkut kerja sama yang hanya terlaksana dengan baik di tingkat pusat, dan tidak terlaksana pada tingkat pelaksana di daerah-daerah.

Karena jumlah mahasiswa yang mendaftar tidak pernah mencapai target, yaitu 500 mahasiswa/tahun, bahkan terlihat kecenderungan penurunan jumlah peserta, maka pada semester empat (91.1) diputuskan untuk memperpanjang masa registrasi, sehingga dapat menjangkau peserta yang lebih banyak. Kenyataannya, hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan pada semester berikutnya pembukaan

program ini sudah dirasakan sebagai dilema. Di satu sisi program ini sudah dilontarkan ke masyarakat luas dan masih ada yang berminat (walaupun jumlahnya sangat sedikit, dan harus dilayani), sedangkan di sisi lain pelaksanaan program dengan mahasiswa yang sedikit ini dirasakan tidak efisien lagi. Penutupan program secara langsung juga belum memecahkan masalah sebab ada beberapa orang mahasiswa yang masih belum selesai/ lulus.

Keadaan yang demikian memaksa pengembang program untuk mengevaluasi program ini bersama dengan instansi yang terkait guna menentukan langkah apa sebaiknya yang harus dilakukan untuk program sertifikat ini.

C. Hasil evaluasi

Rapat evaluasi yang dihadiri oleh tim dari Depnaker RI dan UT, mengevaluasi kegagalan program Kewirausahaan dengan penyebab antara lain:

- Kerja sama yang belum menyeluruh disebabkan kurangnya koordinasi dalam penyampaian informasi, sehingga membingungkan pelaksana di daerah-daerah.
- Pemandu masih kurang jelas dengan pelaksanaan program di daerah sehingga sering muncul persepsi pelaksanaan yang berbeda-beda disesuaikan dengan pengalaman Pemandu tersebut dalam mengelola tugas mereka di Depnaker, misalnya
 - a. dihubungkan dengan binaan terhadap TKST (Tenaga Kerja Sukarela Terdidik) yang dilaksanakan oleh Depnaker, hal ini tidak sesuai karena sasaran yang dituju oleh program kewirausahaan berbeda.
 - b. Pemandu mendapat kesulitan dalam membimbing sebab latar belakang (motivasi) mahasiswa yang ingin memasuki program kewirausahaan

tidak jelas karena tidak ada tes awal yang dapat digunakan untuk menguji motivasi mahasiswa.

- Tindak lanjut kerja sama UT dan Depnaker terputus karena UT lebih mengharapkan Kanwil Depnaker yang aktif bergerak dan bukan Depnaker Pusat, sedangkan untuk BPPD yang menyelenggarakan praktek pemanduan di lapangan memiliki kesibukan besar, sehingga BPPD menurunkan perhatiannya pada tugas-tugas yang dilakukan bersama UT.
- Dengan melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan hasil yang diperoleh, maka untuk selanjutnya pelaksanaan program Kewirausahaan dilakukan hanya oleh UT, bila suatu saat diperlukan bantuan dari Depnaker maka akan ada pembicaraan lebih lanjut.

Universitas Terbuka

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil yang diperoleh selama ini dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Program Kewirusahaan ini adalah program yang kurang diminati oleh masyarakat, walaupun ada yang berminat, jumlahnya tidaklah banyak.
2. Penyelenggaraan program Kewirausahaan kalau memang masih ingin diteruskan haruslah dikemas dalam bentuk baru yang menarik, baik itu modul yang ditawarkan maupun target yang ingin dicapainya. Di samping itu juga perlu dipikirkan kelanjutan dari program.
3. Kendala yang sulit dihilangkan adalah adanya praktikum pemanduan dalam hal membuat proposal usaha . Harus dipikirkan pola baru yang mendukung mahasiswa untuk dapat melakukan praktikum dengan prosedur yang sulit.
4. Diperlukan kerja sama yang benar-benar mantap, baik dari tingkat penyelenggara pusat sampai daerah, sehingga program berjalan dengan baik.
5. Diperlukan uji coba/penelitian tentang minat program Kewirausahaan, sehingga dapat diketahui pada sektor mana masyarakat membutuhkan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

1.Katalog DIKLAT Profesi Wirausaha 1989, UT.
2.Himpunan SK Menteri Tenaga Kerja - Rektor Universitas Terbuka dan Instruksi Petunjuk Pelaksana dan Teknis, Agustus 1988-1989.
3. Sri Yuniati, PKH, 1992. Sebuah Pengamatan: Mencari Alternatif Pengembangan Program Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan setelah berintegrasi dengan FISIP-UT . UT
4. Suharsimi Arikunto, 1988. Penilaian Program Pendidikan. Bina Aksara, Jakarta.
5. Wahjoetomo, 1991. Pengembangan Program Usaha Mandiri dan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi, UNMER, Malang.

Universitas Terbuka

LAMPIRAN

Universitas Terbuka

KEMENTERIAN
 SIKSIAK UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR 110/21/2022/2022

Tentang

REVISI PROGRAM SARJANA WIRASAMA MANDIRI, TERAKREDITASI
 PADA PENDIDIKAN PROFESI, INDUSTRI DAN NEGARA
 DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLISIAL
 UNIVERSITAS TERBUKA

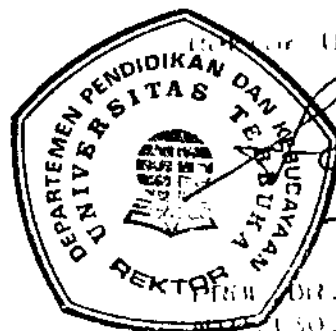
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

- Menyatakan dengan keputusan Rektor Universitas
 Terbuka tanggal 20 Juli 1991, Nomor
 0042/14/KR/1991, telah dihabiskan Yayasan
 Lembaga Pendidikan Profesi, Industri dan
 Negara (LPPIN).
- Menyatakan Yayasan LPPIN, yang mempunyai
 program sarjana fakultas ilmu sosial mandiri
 tersebut.
- Menyatakan agar program LPPIN sebagaimana
 tersebut pada butir a dan b dapat berjalan
 sebagaimana mestinya, maka program
 sarjana fakultas Wirasama Mandiri tersebut
 direvisi dengan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1991
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 1991
 3. Keputusan Presiden RI
 a. Nomor 41 tahun 1991
 4. Nomor 127/12/1991
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan
 Kebudayaan Nomor 0437/02/1991
 6. 11. Rektur Nomor 0052/14/2022/2022
 7. 12. Rektur Nomor 0052/14/2022/2022
 8. 13. Rektur Nomor 0052/14/2022/2022
- Menyatakan dengan Keputusan Menteri Tinggi Tinggi
 Republik Indonesia dan Rektor Universitas
 Terbuka tanggal 20 April 1991
- Menyatakan Keputusan Menteri HI dan PINDIN
 tanggal 11 Januari 1991 tentang mekanisme
 kerja sama untuk menyelenggarakan wirasama
 mandiri.

P E N U T U R A N

1. Mengintegrasikan Program Sertifikat Mandiri Terapan UIN-UF ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.
2. Pengintegrasian sebagaimana tersebut pada butir pertama, adalah program studi yang berdiri sendiri di lingkungan UIN-UF dengan nama Program Studi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.
3. Program studi yang disebut pada butir kedua, untuk sementara, pelaksanaannya adalah Program Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.
4. Program Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam pelaksanaannya dan pengembangannya dapat berbentuk pendidikan dan latihan kewirausahaan mandiri bagi usaha kecil.
5. Dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan kewirausahaan mandiri dapat bekerja sama dengan berbagai instansi.
6. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ketentuan apabila kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan apabila sudah dirumahnya mendikizy.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 24 September 1991



DR. SITIJADI
150.430.959.

KEPUS. SAN
 REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR: 083 /PT45/KEP/1986

Tentang

PENUNJANG LEMBAGA PENDIDIKAN PROFESI, INDUSTRI DAN NIAGA
 PERBAHU PENYELENGGARA PROGRAM PENGAJARAN PROFESI, INDUSTRI
 DAN NIAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

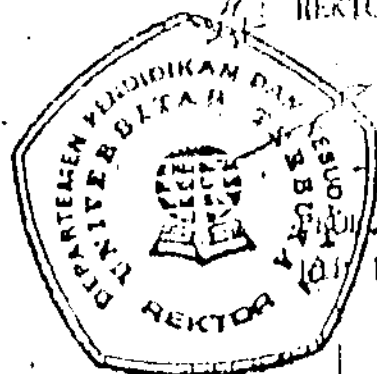
Hal yang

- a. bahwa mahasiswa Universitas Terbuka yang telah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidangnya yang berhubungan dengan program pendidikan Profesi, Industri dan Niaga, secara akademik memenuhi persyaratan dan sarana yang memadai,
- b. bahwa prasarana dan sarana program pendidikan Profesi, Industri dan Niaga yang disediakan oleh Lembaga Pendidikan Profesi, Industri dan Niaga yang didirikan oleh Yayasan Pembina Universitas Terbuka (Akte Notaris Nomor 291 Tanggal 18 Juni 1987), secara akademik dianggap memenuhi syarat,
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a dan b, di samping dan atau sebagai Universitas Terbuka memiliki prasarana dan sarana program pendidikan Profesi, Industri dan Niaga yang memadai secara akademik, dituntut untuk menyediakan Lembaga Pendidikan yang memadai.

Sehubungan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1983;
- b. Peraturan Pemerintah:
 1. Nomor 5 Tahun 1980;
 2. Nomor 27 Tahun 1981;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. Nomor 44 Tahun 1974;
 2. Nomor 15 Tahun 1984;
 3. Nomor 41 Tahun 1984;
 4. Nomor 152/M Tahun 1984;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0389/0/1984;
- e. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 171/PT45/KEP/1986.

- Tetiga** : Dalam melaksanakan tugas perbantuan di atas, khususnya dalam bidang akademik, Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Terbuka, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas-fakultas yang bersangkutan di lingkungan Universitas Terbuka.
- Keempat** : Hal-hal yang berhubungan dengan tata kerja antara Universitas Terbuka dengan lembaga, diatur oleh Universitas Terbuka.
- kelima** : Dalam hal Universitas Terbuka melakukan akreditasi satu kali satu tahun terhadap prasarana dan sarana kegiatan Industri dan Niaga antara lain yang berbentuk fasilitas laboratorium Industri dan Niaga, tempat praktikum, tutorial, dan pengujian, yang berhubungan dengan program pengajaran profesi, Kajian Industri dan Niaga, pengujian biayanya dibebankan pada lembaga.
- keenam** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di Universitas Terbuka.
- ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila kemudiannya terdapat peraturan lain yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam keputusan ini.



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

DR. SETIJADI

130 434 939

- Perhatikan: 1. Nota Rektor Universitas Terbuka tanggal 01 Juni 1988 tentang Kelompok Kerja Pengambanan Program Sertifikat.
2. Program Kerjasama Rektor Universitas Terbuka dengan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 1988 tentang Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Produktivitas.
3. Memori kerjasama Yayasan Pembina Universitas Terbuka dengan Yayasan Pendidikan KAMU Indonesia tanggal 29 Juli 1988.
4. Pertimbangan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- 1. menunjuk Lembaga Pendidikan Profesi, Industri dan Niaga, Akte Notaris Nomor 33 tertanggal 15 Agustus 1988, yang selanjutnya disebut lembaga dalam keputusan ini, sebagai pembantu penyelenggara program pengajaran Profesi, Kajian Industri dan Niaga di lingkungan Universitas Terbuka.

Kedua

- 1. Lembaga bertugas membantu Fakultas Sains dan Teknologi di lingkungan Universitas Terbuka yang ditugaskan menyelenggarakan program pengajaran Profesi, Kajian Industri dan Niaga dalam:

1. mengembangkan program pembelajaran di lingkungan Industri dan Niaga,
2. mengembangkan prototipe laboratorium, praktikum, tutorial, dan lain-lain,
3. menyelenggarakan ujian di lingkungan Industri dan Niaga Profesi, Kajian Industri dan Niaga,
4. menyediakan sarana praktikum serta teknisiannya,
5. menetapkan instruktur dan penguji praktikum,
6. melaksanakan seluruh ketentuan Undang-undang dan peraturan yang relevan dengan hal ini,
7. memberikan masukan pada bahan belajar program pengajaran Profesi, Kajian Industri dan Niaga,
8. menyusun panduan penyelenggaraan praktikum.

tentang

**PENETAPAN YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN
PROFESI INDUSTRI DAN NIAGA**

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan penetapan 01/a / 1970 / 1970 / 1970 Rencabirodjo, 31 tanggal 15 Agustus 1970 telah didirikan Yayasan Lembaga Pendidikan Profesi Industri dan Niaga (LPPIN);
 - b. bahwa dengan keluarnya Perundangan tahun 1970 tentang Pendidikan Tinggi, maka Yayasan Lembaga Pendidikan Profesi Industri dan Niaga (LPPIN) dipandang tidak memenuhi persyaratan sebagai Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa selubungan dengan hal tersebut diatas dan b diatas, dipandang perlu agar Yayasan Lembaga Pendidikan Profesi Industri dan Niaga (LPPIN).
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 1977
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia
1. Nomor 41 / 1970 / 1970
2. Nomor 1670 / 1970
3. Nomor 35 / 1970 / 1970
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 / 1970 / 1970
 - e. Penetapan 01/a / 1970 / 1970
1. Sebagai Badan Pendidikan dan
Nomor 33,
2. Tahir Kamili, S.H tanggal 20 Juni 1970

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Lembaga Pendidikan Profesi Industri dan Niaga (LPPIN) tanggal 2 Juli 1971.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membubarkan Yayasan Lembaga Pendidikan Profesi, Teknologi dan Niaga (LAPIN) terhitung sejak tanggal 15 April 2019.
- Kedua :** Hal-hal yang berkenaan dengan akta final LAPIN ke kemudian hari ditentukan sebagai berikut :
1. Penyelesaian kekayaan yayasan (liquidation) akan dilaksanakan oleh mantan pengurus badan dalam waktu secepatnya,
 2. Setelah pembubaran yayasan ini maka seluruh perusahaan Wirausaha yang semula dikelola oleh LAPIN selanjutnya dialihkan ke FISIP-UT.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian dietapkan perubahan, kekeliruan dalam penetapan ini, akan berlaku secepatnya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2019

Rektor Universitas Terbuka

